
Dampak Dana Perimbangan Terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi

Sesraria Yuvanda¹⁾
Universitas Muhammadiyah Jambi¹⁾
sesrariayuvanda@umjambi.co.id¹⁾
Muhammad Rachmad Rasjid²⁾
Universitas Jambi²⁾
mrachmadr@gmail.com
Faradilla Herlin³⁾
Universitas Muhammadiyah Jambi³⁾
laresajambi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dampak DAU, DAK dan DBH terhadap Ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang merupakan data panel yaitu gabungan antara jenis data time series 2017 – 2022 dan data silang (cross section) dari 11 kabupaten/kota di provinsi Jambi. Model Analisis pada penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan menggunakan alat E-Views 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang tepat untuk penelitian ini adalah Model Fixed Effect dengan memperlihatkan bahwa variable DAU berpengaruh positif terhadap PDRB, DAK berpengaruh negative terhadap PDRB sedangkan DBH tidak berpengaruh terhadap PDRB.

Kata kunci : DAU, DAK, DBH, PDRB

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi daerah sangat tergantung pada sumber pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah tersebut dapat bersumber dari pendapatan asli daerah, dana transfer dan sumber pendapatan lainnya yang sah. Dana transfer dapat berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah dan dana untuk otonomi khusus dan istimewa. Kontribusi dana transfer atau dikenal juga dengan dana perimbangan sangat besar terhadap sumber pembiayaan daerah karena pendapatan asli daerah masih kecil kontribusinya.

Berlakunya otonomi daerah maka daerah lebih leluasa dalam mengatur dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah (Fabiany, 2021; Setiawan et al., 2020). Namun kenyataannya daerah masih dominan tergantung pendanaan dari pusat (Azizi, 2018; Devita et al., 2022; Herlin et al., 2022). Seharusnya untuk melaksanakan otonomi daerah pendapatan asli daerah harus berkontribusi minimal 25 persen terhadap pendapatan daerah. Kenyataannya pendapatan asli daerah mayoritas masih di bawah 10 persen, akibatnya peran dan kontribusi dana transfer yang

berupa DBH, DAU dan DAK tersebut sangat besar terhadap penerimaan daerah. Hal ini terlihat dari pernyataan (Asman et al., 2023) bahwa provinsi Jambi masih dominan PAD sebagai penerimaan pendapatan daerah. Untuk itu Potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global juga patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Ariansyah & Rasid, 2023)

Dana transfer atau dana perimbangan yang merupakan DBH, DAU dan DAK punya fungsi dan peran yang berbeda. DAU lebih difokuskan untuk pembiayaan ASN (Aparatur Sipil Negara), dana alokasi khusus lebih fokus membiayai pembangunan infrastruktur daerah. Alokasi DAK (Sudaryo et al., 2023) memiliki peran yang sangat strategis dalam menyelesaikan persoalan ketimpangan fiskal (*fiscal imbalance*), baik yang bersifat vertikal (Pemerintah Pusat dan Daerah) maupun horizontal (antar Pemerintah Daerah). Sedangkan DBH diberikan kewenangan daerah untuk menggunakannya. Secara substansi DAK lebih besar perannya dalam menumbuhkembangkan ekonomi daerah karena menyangkut tentang pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong tumbuh kembangnya ekonomi daerah terutama infrastruktur fisik ekonomi daerah.

Untuk melihat dampak dana perimbangan/transfer pada kabupaten/kota di provinsi Jambi dalam Upaya meningkatkan ekonomi daerah maka diperlukan analisis yang tajam terhadap penggunaan dana tersebut yang berdampak bagi tumbuh kembangnya ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jambi. Data tahun 2017-2022 pada tabel 1 memperlihatkan jumlah dana perimbangan yang diperoleh kabupaten/kota di provinsi Jambi.

Tabel 1. Data Rata-rata Penerimaan DBH, DAU dan DAK di kabupaten/kota di Provinsi selama tahun 2017 - 2022

Daerah	DBH	DAU	DAK
Batanghari	146.550.484.267	591.161.816.000	188.931.970.623
Sarolangun	113.407.608.662	563.164.632.500	152.474.402.816
Merangin	60.756.621.285	697.449.071.667	205.899.702.797
Bungo	86.054.030.886	621.084.701.333	188.472.708.168
Tebo	76.543.729.253	561.988.976.833	172.825.437.550
Muaro Jambi	129.794.201.157	654.831.787.833	177.309.393.245
Tanjabbar	402.650.488.957	502.434.925.193	163.456.688.336
Tanjabtim	153.175.533.815	534.455.920.167	198.940.120.542
Sungai Penuh	54.815.380.018	421.010.039.667	98.565.036.166
Kerinci	55.301.799.579	582.085.263.000	170.817.743.626
Kota Jambi	110.254.558.580	707.896.090.000	240.952.219.815

Sumber : Kemenkeu, 2023

Dana perimbangan pada tabel 1 digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai belanja pegawai dan kegiatan Pembangunan baik terhadap langsung dengan Masyarakat maupun tidak langsung. Khusus DAK sangat berdampak ekonomi daerah karena dana tersebut digunakan untuk Pembangunan infrastruktur ekonomi daerah.

Perkembangan ekonomi didaerah yang dalam hal ini dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota selama tahun 2017- 2022 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif. Khusus pada tahun 2020 kondisi pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pertumbuhan negative akibat pandemi covid 19. Namun setelah covid berakhir, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jambi kembali meningkat. Distribusi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Kabupaten/kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	5,86	4,93	4,23	3,81	3,89	4,43
Merangin	5,39	4,93	4,25	0,78	5,24	5,72
Sarolangun	4,68	4,8	4,26	-0,25	6,61	6,73
Batanghari	4,81	4,83	5,07	-0,43	4,85	12,27
Muaro Jambi	4,95	5,01	4,79	0,35	4,06	7,97
Tanjung Jabung Timur	3,07	2,94	4,21	-3,44	0,14	0,57
Tanjung Jabung Barat	4,48	6,77	5,01	-0,29	1,36	2,56
Tebo	5,58	4,98	4,76	-0,03	4,3	6,3
Bungo	5,68	4,65	4,19	-0,48	4,99	4,73
Kota Jambi	4,68	5,3	4,73	-4,24	4,08	5,36
Kota Sungai Penuh	6,02	4,88	5,01	-0,16	3,67	4,45

Sumber ; BPS, 2023

Dari tabel 2 dapat dilihat beberapa kabupaten mengalami pertumbuhan ekonomi dilihat selama 6 tahun. Kabupaten yang mengalami pertumbuhan ekonomi tersebut adalah kabupaten Batang Hari, kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo dan Kota Jambi. Sedangkan beberapa kabupaten yang ada di provinsi Jambi menunjukkan angka yang fluktuasi. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis bagaimana dampak dana transfer tersebut terhadap ekonomi daerah kabupaten/kota.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang merupakan data panel yaitu gabungan antara jenis data time series 2017 – 2022 dan data silang (*cross section*) dari 11 kabupaten/kota di provinsi Jambi. Variabel yang akan diteliti adalah dana bagi hasil, dana alokasi umum dan PDRB. Data diperoleh bersumber dari BPS Provinsi Jambi,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Model yang digunakan untuk menentukan variable yang berpengaruh terhadap PDRB ini adalah model analisis regresi data panel.

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 DBH_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \mu_{it}$$

Dimana :

$PDRB_{it}$ = PDRB kabupaten/kota di provinsi Jambi

DBH_{it} = Dana Bagi hasil kabupaten/kota di provinsi Jambi

DAU_{it} = Dana Alokasi Umum kabupaten/kota di provinsi Jambi

DAK_{it} = Dana Alokasi Khusus kabupaten/kota di provinsi Jambi

μ_{it} = error term

β_0 = Koefisien regresi

β_1 = koefisien regresi DBH kabupaten/kota di provinsi Jambi

β_2 = koefisien regresi DAU kabupaten/kota di provinsi Jambi

β_3 = koefisien regresi DAK kabupaten/kota di provinsi Jambi

HASIL

Model regresi data panel yang terdiri atas tiga pendekatan yaitu model *Common Effect*, Model *Fixed Effect* dan model *Random Effect* Untuk memutuskan model mana yang tepat maka dilakukan uji Chow dan Uji Hausman. Berdasarkan pengolahan data dengan memperhatikan uji Chow dan Uji Housman maka model yang tepat untuk penelitian ini adalah Model *Fixed Effect*. Hasil olahan data tersebut disajikan pada tabel dibawah ini.

Dependent Variable: PDRB?
Method: Pooled Least Squares
Date: 06/30/23 Time: 11:04
Sample: 1 6
Included observations: 6
Cross-sections included: 11
Total pool (balanced) observations: 66

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20175.02	2157.986	9.349006	0.0000
DBH?	1.69E-09	2.59E-09	0.651729	0.5174
DAU?	-1.52E-08	3.72E-09	-4.093061	0.0001
DAK?	1.18E-08	2.09E-09	5.639105	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_BATANGHARI--C	-1792.428			
_BUNGO--C	-502.8535			
_KERINCI--C	-6965.980			

_KOTAJAMBI--C	6728.370
_MERANGIN--C	-2189.967
_MUARAJAMBI--C	3727.927
_SAROLANGUN--C	-2727.039
_SUNGAIPENUH--C	-10427.04
_TANJABBAR--C	15032.28
_TANJABTIM--C	2712.259
_TEBO--C	-3595.534

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.993241	Mean dependent var	13573.16
Adjusted R-squared	0.991551	S.D. dependent var	6811.765
S.E. of regression	626.1226	Akaike info criterion	15.90280
Sum squared resid	20385535	Schwarz criterion	16.36727
Log likelihood	-510.7924	Hannan-Quinn criter.	16.08634
F-statistic	587.7941	Durbin-Watson stat	1.556162
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan model data panel yang terpilih yaitu Model *Fixed Effect* maka dapat dibuat asumsi diantaranya :

1. Model Regresi Data Panel Fixed Effect

$$PDRB_{it} = \beta_i + \beta_1 DBH_{it} - \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \mu$$

$$Y = 20175.02 + 1.69E-09 DBH - 1.52E-08 DAU + 1.18E-08 DAK + \mu$$

2. Interpretasi hasil model terpilih

Hasil pengujian data panel diatas maka yang terpilih adalah model *Fixed Effect* dimana terlihat bahwa :

- a. Nilai Koefisien β_0 untuk kabupaten/kota sebesar 20175.02 artinya, apabila pada periode 2017-2022 tidak terjadi perubahan variable DBH, DAU dan DAK atau dengan asumsi konstan, maka PDRB untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi Jambi akan meningkat sebesar 20.175,02 rupiah.
- b. Nilai koefisien regresi DBH (β_1) diperoleh sebesar 1.69E-09 artinya, apabila pada periode 2017-2022 variabel DBH ditingkatkan sebesar 1 milyar rupiah maka akan terjadi peningkatan PDRB sebesar 1.69E-09 milyar dengan asumsi variable DAU dan DAK konstan.
- c. Nilai koefisien regresi DAU (β_2) diperoleh sebesar -1.52E-08 artinya apabila pada periode 2017-2022 variabel DAU ditingkatkan sebesar 1 milyar rupah maka akan

- menurunkan PDRB sebesar $-1.52E-08$ milyar rupiah dengan asumsi variable DBH dan DAK konstan.
- d. Nilai koefisien regresi DAK (β_3) diperoleh sebesar $1.18E-08$ artinya, apabila pada periode 2017-2022 variabel DAK ditingkatkan sebesar 1 milyar rupiah maka akan terjadi peningkatan PDRB sebesar $1.18E-08$ milyar rupiah dengan asumsi variable DBH dan DAK konstan.
 - e. Variable yang sangat berpengaruh positif terhadap PDRB adalah variable Dana alokasi khusus (DAK) pada $P = 0.0000$. ini berarti dana alokasi khusus dapat mendorong peningkatan besaran PDRB. Bila dana alokasi khusus yang ditransfer dari pemerintah pusat maka akan terjadi peningkatan PDRB kabupaten/kota di provinsi Jambi. Untuk itu Upaya melobi pemerintah pusat guna meningkatkan besaran dana alokasi khusus (DAK)
 - f. Variable DAU juga sangat berpengaruh terhadap PDRB tetapi pengaruh tersebut bernilai negative. Artinya peningkatan DAU akan menurunkan besaran PDRB. Hasil penelitian ini berlawanan arah dengan (Budiarto, 2022) Dimana DAU berpengaruh positif terhadap PDRB. Oleh karena DAU berkaitan dengan jumlah pegawai negeri dan honorer yang terdapat pada kabupaten/kota maka peningkatan DAU identic dengan peningkatan jumlah pegawai negeri dan honor yang berdampak negative terhadap PDRB. Hal ini terjadi karena jumlah pegawai negeri dan honorer tersebut kontra produktif terhadap PDRB. Hal ini terjadi karena pegawai negeri dan honor dalam kenyataanya kurang produktif dalam bekerja yang dapat mendorong peningkatan PDRB.
 - g. Variable DBH tidak berpengaruh terhadap PDRB. Hal ini terjadi karena peningkatan DBH tidak berkaitan dengan PDRB terutama bagi daerah yang tidak menghasilkan langsung migas dan non migas (pajak) sebagai kompone yang dihimpun oleh DBH. Perolehan DBH tersebut tidak mendorong dan tidak terkait dengan PDRB kecuali daerah penghasil migas dan non migas yang menghimpun dana DBH tersebut.
 - h. Pada sisi lain nilai R-squared adalah sebesar 0.993241, ini berarti peran variable DAK, DAU dan DBH terhadap PDRB cukup besar, dimana nilainya hampir 100% perannya dalam mempengaruhi PDRB.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan model *Fixed Effect* maka dapat disimpullkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap PDRB sedangkan DAU berpengaruh negative terhadap PDRB.

Untuk variable DBH tidak berdampak terhadap PDRB. Ini berarti peningkatan PDRB sangat ditentukan oleh peningkatan DAK.

REFERENSI

- Ariansyah, M., & Rasid, M. R. (2023). *Province Regional Tax Revenue Increase Model*. 06(09), 4390–4397. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i9-27>
- Asman, M., Rachmad R, M., Zamzami, & Lubis, T. A. (2023). Research in Business & Social Science Analysis of dominant factors affecting regional tax revenue in regency , city of Jambi province. *International Journal Of Research In Business And Social Science*, 12(4), 304–309.
- Azizi, M. (2018). The Implication Of General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Profit Sharing Fund To Inequality The Gross Regional Domestic Product In South Sulawesi Province Period 2006-2014. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 3(1), 113–135. <https://doi.org/10.30984/tjebi.v3i1.657>
- Budiarto, S. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Devita, A., Handra, H., & Yonnedi, ; Efa. (2022). Kemampuan fiskal daerah Provinsi Jambi Studi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3), 2085–1960.
- Fabiany, N. F. (2021). Analisis Sektor Unggulan Perekonomian Di Provinsi Jambi Tahun 2020. *Manajemen Terapan Dan Keuangan (Menkeu)*, 10(03), 619–632.
- Herlin, F., Rachmad R, M., Zamzami, Z., Safri, M., & Yacob, S. (2022). Improvement strategy for regional financial performance affecting macroeconomics in regency/city in Jambi province. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 11(8), 401–408. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i8.2169>
- Nurafni, H., Rachmad, M. R., & Safri, M. (2021). *Analisis determinan kemiskinan dan hubungannya dengan program pengentasannya Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi*. 16(4), 689–704.
- Setiawan, B., R, M. R., & Delis, A. (2020). Analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan-P2 serta pengaruhnya terhadap pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15(2), 183–196. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v15i2.10320>
- Sudaryo, S., R, M. R., Zamzami, Z., & Safri, M. (2023). What Factors Affect Expenditures of Goods Services For Infrastructure In Indonesia. *International Journal of Advanced Multidisciplinary*, 1(4), 411–422.